

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM DAN SETELAH DITETAPKANNYA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 29 TAHUN 2002 (STUDI TERHADAP BEBERAPA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH)

Cici Dewi Sari Murni
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Langsa
E-mail: ciciharyadi21@yahoo.co.id

Abstract

This study aims to see whether there are differences in local government financial performance before and after the stipulation of Kepmendagri No.29 of 2002. This research was conducted in 12 districts / cities in Aceh which had not been expanded until 2001. The data used were secondary data with data collection techniques. documentation derived from the BPS in the Province of Aceh and other supporting sources. The variables used are the ratio of financial ability, ability to mobilize, level of dependency and fiscal decentralization. Data were analyzed using parametric statistics which are different tests for two paired samples (paired sample t-test). The results showed that the financial performance of local governments in the form of financing ability, mobilization ability, level of dependency before the stipulation of Kepmendagri No.29 of 2002 was not different from after the stipulation of Kepmendagri No.29 of 2002, whereas in the form of fiscal decentralization before the stipulation of Kepmendagri No.29 of 2002 is different from after the stipulation of Kepmendagri No.29 of 2002.

Keywords: Kepmendagri No.29 of 2002, financing capability, mobilization ability, level of dependency and fiscal decentralization.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah ada perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan setelah ditetapkan Kepmedagri No.29 Tahun 2002. Penelitian ini dilakukan di 12 Kabupaten/Kota di Aceh yang belum dimekarkan sampai tahun 2001. data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data secara dokumentasi yang berasal dari BPS Provinsi Aceh serta sumber-sumber lain yang mendukung. Variabel yang digunakan adalah rasio kemampuan pembiayaan, kemampuan mobilisasi, tingkat ketergantungan dan desentralisasi fiskal. Data dianalisa dengan menggunakan statistik parametrik yaitu uji beda untuk dua sampel berpasangan (paired sampel t-test). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dalam bentuk kemampuan pembiayaan, kemampuan mobilisasi, tingkat ketergantungan sebelum ditetapkan Kepmedagri No.29 Tahun 2002 tidak berbeda dengan setelah ditetapkan Kepmedagri No.29 Tahun 2002, sedangkan dalam bentuk desentralisasi fiskal sebelum ditetapkan Kepmedagri No.29 Tahun 2002 berbeda dengan setelah ditetapkan Kepmedagri No.29 Tahun 2002.

Kata kunci: Kepmendagri No.29 Tahun 2002, kemampuan pembiayaan, kemampuan mobilisasi, tingkat ketergantungan dan desentralisasi fiskal.

PENDAHULUAN

Reformasi politik di Indonesia telah mengubah sistem kehidupan bernegara. Tuntutan pemerintah yang baik (*good governance*) diterjemahkan sebagai terbebas dari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme. Oleh karena itu pemisahan kekuasaan antar Eksekutif, Yudikatif dan Legislative dilaksanakan. Selain, partisipasi masyarakat akan mendorong praktek demokrasi dalam pelaksanaan akuntabilitas publik yang sesuai dengan jiwa otonomi daerah (Bastian, 2006:51).

UU No. 22 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah yang juga telah direvisi dengan UU No. 33 Tahun 2004 adalah dua undang-undang yang berupaya mewujudkan otonomi daerah tersebut. Sebagai penjabaran otonomi daerah tersebut di bidang administrasi dan keuangan daerah, dikeluarkan berbagai peraturan perundangan yang lebih operasional. Namun peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah tersebut telah banyak mengalami perubahan sejak tahun 1999, yaitu sejak bergulirnya proses reformasi di Indonesia. Perubahan peraturan pelaksanaan tersebut tidak terlepas dari berubahnya perundang-undangan tentang keuangan Negara (UU No.17/2003) dan undang-undang tentang perbendaharaan Negara (UU No.1/2004), serta peraturan-peraturan yang terkait.

Kepmendagri No.29 Tahun 2002 adalah pedoman pengelolaan keuangan daerah yang pertama setelah otonomi daerah. Kepmendagri ini juga adalah saat diberlakukan atau dimulainya sistem anggaran berbasis kinerja dimana sebelumnya sistem keuangan daerah menggunakan sistem anggaran berimbang. Dengan dikeluarkannya Kepmendagri tersebut pemerintah daerah diwajibkan membuat laporan keuangan daerah sebagai bagian dari pertanggungjawaban terhadap daerah. Dengan penerapan sistem baru ini diharapkan, daerah dapat mengelola sumber daya alam secara optimal untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kinerja pemerintah daerah (Susanti, 2006:2).

Pemerintah Daerah khususnya Aceh memiliki hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah dengan arah dan tujuan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparansi baik kepada masyarakat di Aceh sendiri, maupun kepada Pemerintah Pusat yang telah membagikan dana perimbangan kepada seluruh daerah di Indonesia (Susanti, 2006:2).

Penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah pernah dilakukan oleh Arifin (2005), Landiyanto (2005), Bayani (2005), Susanti (2006). Masing masing

peneliti tersebut menggunakan tahun anggaran yang berbeda serta subjek dan objek penelitian yang berbeda pula pada penelitiannya. Tetapi dari hasil penelitian mereka secara keseluruhan dapat dilihat bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah masih sangat memprihatinkan. Pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat disebabkan belum optimalnya penerimaan daerah yang berasal dari PAD. Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Arifin (2005) yang menganalisis tentang kinerja pemerintah daerah sebelum dan sesudah pada saat fiscal stress (studi terhadap beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana kinerja keuangan daerah sebelum dan setelah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002.

LANDASAN TEORITIS

Kinerja dan Pengukuran Kinerja

Definisi mengenai kinerja dikemukakan oleh Bastian (2006:274) sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Secara umum kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Sedangkan menurut Sulistiowati (2005:29) kinerja merupakan kuantitas dan kualitas pekerjaan dalam periode tertentu.

Menurut Larry D Stout (Bastian, 2006:275) pengukuran kinerja merupakan proses pencatatan dan pengukuran pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, maupun proses. Sedangkan menurut Lohman (Mahsun et al, 2006:145) pengukuran kinerja adalah suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi. Menurut Sucipto (2003) kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba.

Untuk mengukur kinerja keuangan dan kemandirian keuangan Pemerintah Daerah dapat digunakan analisis rasio melalui tiga pendekatan (Halim, dalam Arifin, 2005:108), meliputi : tingkat kemandirian pembiayaan, tingkat ketergantungan, dan desentralisasi fiskal.

Kepmendagri No.29 Tahun 2002

Kepmendagri No.29 tahun 2002 merupakan peraturan pelaksanaan lebih lanjut dari PP No.105 tahun 2002 yang telah diganti dengan PP No. 58 tahun 2005 tentang

pengelolaan keuangan daerah. Menurut Fadillah dan Muhtar (2004:28) berdasarkan Kepmendagri No.29 tahun 2002 tersebut di atas, maka untuk menyusun APBD yang memenuhi asas tertib, transparansi, akuntabilitas, dan mudah dimengerti perlu disusun arah dan kebijakan umum APBD yang diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat yang berpedoman pada rencana strategis daerah. Kepmendagri No.29 tahun 2002, memberikan kebebasan dan keleluasaan pada pemerintah kabupaten/kota yang lebih besar untuk melakukan improvisasi dan deversifikasi fiskal guna meningkatkan sumber pembiayaan untuk mendorong proses akselerasi pembangunan daerah secara keseluruhan .

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan pasal 64 ayat (2) Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah di Daerah, APBD dapat didefinisikan sebagai rencana oprasional keuangan Pemerintah Daerah, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek dalam satu tahun anggaran tertentu, dan pihak lain menggambarkan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna pengeluaran-pengeluaran dimaksud (Mamesah dalam Halim,2004:15).

Rendahnya APBD dan dominannya transfer dari pusat telah menyebabkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Hal ini seperti yang telah disebutkan oleh Kuncoro (2004), bahwa setidaknya ada 5 penyebab tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat yaitu:

1. Kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
2. Tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan.
3. Hanya sedikit pajak daerah yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan.
4. Penyebab politis yaitu adanya kekhawatiran bila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatisme.
5. Kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Tingkat Kemandirian Pembiayaan

Tingkat kemandirian pembiayaan digunakan untuk menguji tingkat kekuatan kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam pembiayaan APBD setiap periode anggaran (Arifin,2005:108). Semakin tinggi derajat kemandirian pembiayaan

suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Menurut Landiyanto (2005) secara umum, semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai pengeluarannya sendiri menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif.

Menurut kuncoro (Arifin, 2005:108) tingkat kemandirian pembiayaan daerah diukur dengan dua kriteria, meliputi : kemampuan daerah dalam pembiayaan dan kemampuan mobilisasi daerah. Kemampuan daerah dalam pembiayaan diukur dengan rasio PAD terhadap jumlah belanja rutin Non pegawai (BRNP). Kemampuan mobilisasi daerah ditentukan dengan ukuran rasio pajak daerah (PD) terhadap PAD.

Tingkat ketergantungan

Tingkat ketergantungan digunakan untuk mengukur kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD. Alat analisis yang digunakan adalah analisis derajat otonomi fiskal. Derajat otonomi fiskal ini menunjukkan kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD. Rasio yang digunakan untuk mengukur derajat otonomi fiskal adalah *administrative independent ratio* yaitu rasio antara PAD dengan total penerimaan APBD tanpa subsidi (TPDTS) (Arifin, 2005:109). Hal yang sama juga dikemukakan oleh tangkilisan (2005:84) bahwa ukuran yang digunakan untuk mengukur derajat otonomi fiskal daerah dilihat dan diukur dari struktur penerimaan daerah, dengan menggunakan rasio antara PAD dengan total APBD minus transfer dari pusat.

Tingkat ketergantungan menggambarkan hubungan antara ketergantungan daerah atas dana pusat (Kuncoro, 2004:15). Pemerintah daerah sebagai pelaksana roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat harus mampu meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Rendahnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah dapat dilihat dari rendahnya transfer dari pemerintah pusat. Semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD nya, maka semakin rendah tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat, dan sebaliknya semakin rendah PAD yang dihasilkan pemerintah daerah maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Desentralisasi Fiskal

Menurut bahl (Mariana, 2005) desentralisasi fiskal adalah penyerahan kewenangan di bidang keuangan antar level pemerintahan yang mencakup bagaimana pemerintah pusat mengalokasikan sejumlah besar dana dan/atau sumber-sumber daya ekonomi kepada daerah untuk dikelola menurut kepentingan dan kebutuhan daerah itu sendiri. Desentralisasi fiskal berfungsi untuk menentukan jumlah uang yang akan digunakan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada mas-

yarakat. Setelah ada kepastian mengenai jumlah alokasi dana yang akan di transfer, selanjutnya ditentukan bagaimana mekanisme pembagian dan penyalurannya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah supaya pelayanan publik dapat terlaksana secara efisien dan efektif.

Menurut Kuncoro (2004:8) indikator desentralisasi fiskal adalah rasio antara PAD terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD). Desentralisasi Fiskal menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yaitu kabupaten atau kota untuk melaksanakan pembangunan. Hal ini berarti pemerintah pusat memberikan otonomi kepada daerah untuk menyelenggarakan program-program regional sehingga seluruh pertanggungjawaban pengelolaan dan pembiayaannya dilakukan oleh pemerintah daerah (Arifin, 2005:110).

HIPOTESIS

Hipotesis dalam penelitian adalah :

- H1 : Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam bentuk tingkat kemandirian kemampuan pembiayaan sebelum ditetapkan Kepmendagri No.29 tahun 2002 berbeda dengan setelah ditetapkan Kepmendagri No.29 tahun 2002
- H2 : Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam bentuk kemampuan mobilisasi sebelum ditetapkan Kepmendagri No.29 tahun 2002 berbeda dengan setelah ditetapkan Kepmendagri No.29 tahun 2002.
- H3 : Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam bentuk tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat sebelum ditetapkan Kepmendagri No.29 tahun 2002 berbeda dengan setelah ditetapkan Kepmendagri No.29 tahun 2002.
- H4 : Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam bentuk desentralisasi fiskal sebelum ditetapkan Kepmendagri No.29 tahun 2002 berbeda dengan setelah ditetapkan Kepmendagri No.29 tahun 2002.

METODE

Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilakukan di kabupaten/kota di Aceh, yang terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota. Karena analisis dimulai dari tahun 2001, maka kabupaten/kota yang baru dimekarkan diatas tahun 2001 tidak dimasukkan sebagai subjek analisis karena data tidak mencukupi untuk dianalisis. Observasi dilakukan sebanyak dua kali di tahun 2001-2002 dan 2003-2004, yaitu sebelum dan sesudah ditetapkan Kepmendagri No.29 tahun 2002.

Variabel Pengukuran

Kemampuan Pembiayaan. Indikatornya adalah perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan jumlah Belanja Rutin Non Pegawai (BRNP) dan diukur dengan skala rasio sebagaimana yang digunakan Kuncoro (Arifin, 2005:108).

Kemampuan Mobilitas. Indikatornya adalah perbandingan antara pajak daerah (PD) dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan diukur dengan skala rasio sebagaimana yang digunakan Arifin (2005:108).

Tingkat Ketergantungan. Indikatornya adalah Perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Penerimaan APBD tanpa Subsidi (TPDTS) dan diukur dengan skala rasio sebagaimana yang digunakan Arifin (2005:109) dan Tangkilisan (2005:84).

Desentralisasi Fiskal. Indikatornya adalah Perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Penerimaan Daerah (TPD) dan diukur dengan skala rasio sebagaimana yang digunakan Kuncoro (2004:8).

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data berasal dari badan pusat statistik Provinsi Aceh dan sistem situs informasi keuangan www.sikd@djapk.go.id dan www.djpkpd.go.id, serta sumber-sumber lain. Data penelitian ini dianalisis secara kuantitatif yang bersumber dari realisasi APBD Pemerintah Provinsi Aceh.

Metode Analisis Data

Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menghitung variable-variabel penelitian per tahun dengan formula yang telah ditetapkan.
- 2) Variabel penelitian yang telah dihitung rasionya selanjutnya dipisahkan menjadi 2 periode yaitu sebelum ditetapkannya Kepmendagri No.29 tahun 2002 dan periode sesudah ditetapkannya Kepmendagri No.29 tahun 2002. Periode sebelum ditetapkannya Kepmendagri No.29 tahun 2002 diwakili oleh data realisasi tahun anggaran 2001 sampai dengan 2002, sedangkan periode sesudah ditetapkannya Kepmendagri No.29 diwakili oleh data realisasi tahun anggaran 2002 sampai dengan 2003.
- 3) Pengelolaan data pada penelitian ini menggunakan alat bantu program

SPSS 15.0. Langkah awal untuk menentukan statistik yang sesuai dilakukan pengujian normalitas data dengan *one sample kolmogorov smirnov test*. Setelah itu dilakukan uji distribusi data dan terbukti bahwa data terdistribusi normal, selanjutnya dilakukan inferensi dengan metode statistik parametrik yaitu dengan uji beda untuk dua sample berpasangan (*paired sample test*). Paired sample T-Test adalah analisis dengan melibatkan dua pengukuran pada subjek yang sama terhadap suatu pengaruh atau perlakuan tertentu. Pengukuran pertama dilakukan sebelum diberi perlakuan tertentu dan pengukuran kedua dilakukan sesudahnya (Trihendradi, 2005:150)

- 4) Untuk memperkuat analisis, perhitungan dilakukan dengan dua cara yaitu periode dua tahun sebelum dan sesudah Kepmendagri No.29 tahun 2002, serta periode satu tahun sebelum dan sesudah Kepmendagri No.29 tahun 2002.

Untuk pengambilan keputusan ditentukan apabila $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ atau nilai probabilitas ($P\text{-value}$) $< \alpha$ (0,05) berarti H_a diterima dan sebaliknya jika $H_a > \alpha$ (0,05) berarti H_a ditolak dan H_o diterima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Untuk Periode Dua Tahun Sebelum dan Sesudah Ditetapkannya Kepmendagri No.29 tahun 2002.

Hasil uji normalitas data dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk periode dua tahun sebelum dan sesudah ditetapkannya Kepmendagri No.29 tahun 2002 adalah semua data terdistribusi secara normal. Dengan asumsi tingkat signifikansi α (0,05). Adapun nilai probabilitas dari hasil uji sebagai berikut :

1. Kemampuan pembiayaan sebelum dan setelah ditetapkannya Kepmendagri No.29 tahun 2002 adalah 0,108 dan 0,547.
2. Kemampuan mobilisasi sebelum dan setelah ditetapkannya Kepmendagri No.29 tahun 2002 adalah 0,301 dan 0,493.
3. Tingkat ketergantungan sebelum dan setelah ditetapkannya Kepmendagri No.29 tahun 2002 adalah 0,438 dan 0,475.
4. Tingkat desentralisasi fiskal sebelum dan setelah ditetapkannya Kepmendagri No.29 tahun 2002 adalah 0,431 dan 0,735.

Untuk menguji apakah sampel dua tahun sebelum dan sesudah ditetapkannya Kepmendagri No. 29 tahun 2002 mempunyai perbedaan dalam tingkat kemandirian pembiayaan, kemampuan mobilisasi, tingkat ketergantungan dan desentralisasi

fiskal digunakan uji beda dua rata-rata (paired sample t-test). Hasil uji beda rata-rata sebagai berikut :

1. Kemampuan pembiayaan sebelum dan setelah ditetapkan Kepmendagri No.29 tahun 2002 adalah 0,215 dan 0,279.
2. Kemampuan mobilisasi sebelum dan setelah ditetapkan Kepmendagri No.29 tahun 2002 adalah 0,305 dan 0,227.
3. Tingkat ketergantungan sebelum dan setelah ditetapkan Kepmendagri No.29 tahun 2002 adalah 0,357 dan 0,307.
4. Tingkat desentralisasi fiskal sebelum dan setelah ditetapkan Kepmendagri No.29 tahun 2002 adalah 0,020 dan 0,0327.

Dari hasil pengujian dengan menggunakan *Paired sampel T-test* diperoleh bahwa tidak ada perbedaan kinerja keuangan untuk periode dua tahun baik sebelum maupun setelah ditetapkan Kepmendagri No.29 tahun 2002, kecuali untuk rasio desentralisasi fiskal yang lebih baik setelah ditetapkan Kepmendagri No.29 tahun 2002.

Pengujian Untuk Periode Satu Tahun Sebelum dan Sesudah Ditetapkannya Kepmendagri No.29 tahun 2002.

Hasil uji normalitas data dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk periode satu tahun sebelum dan sesudah ditetapkan Kepmendagri No.29 tahun 2002 adalah semua data terdistribusi secara normal. Dengan asumsi tingkat signifikansi α (0,05). Adapun nilai probabilitas dari hasil uji sebagai berikut :

- 1) Kemampuan pembiayaan sebelum dan setelah ditetapkan Kepmendagri No.29 tahun 2002 adalah 0,168 dan 0,756.
- 2) Kemampuan mobilisasi sebelum dan setelah ditetapkan Kepmendagri No.29 tahun 2002 adalah 0,689 dan 0,643.
- 3) Tingkat ketergantungan sebelum dan setelah ditetapkan Kepmendagri No.29 tahun 2002 adalah 0,914 dan 0,489.
- 4) Tingkat desentralisasi fiskal sebelum dan setelah ditetapkan Kepmendagri No.29 tahun 2002 adalah 0,527 dan 0,974.

Untuk menguji apakah sampel satu tahun sebelum dan sesudah ditetapkan Kepmendagri No.29 tahun 2002 mempunyai perbedaan dalam tingkat kemandirian pembiayaan, kemampuan mobilisasi, tingkat ketergantungan dan desentralisasi fiskal digunakan uji beda dua rata-rata (paired sample t-test). Hasil uji beda rata-rata sebagai berikut :

- 1) Kemampuan pembiayaan sebelum dan setelah ditetapkan Kepmendagri No.29 tahun 2002 adalah 0,2289 dan 0,275.
- 2) Kemampuan mobilisasi sebelum dan setelah ditetapkan Kepmendagri No.29 tahun 2002 adalah 0,3341 dan 0,260.
- 3) Tingkat ketergantungan sebelum dan setelah ditetapkan Kepmendagri No.29 tahun 2002 adalah 0,3317 dan 0,322.
- 4) Tingkat desentralisasi fiskal sebelum dan setelah ditetapkan Kepmendagri No.29 tahun 2002 adalah 0,0164 dan 0,033.

Dari hasil pengujian dengan menggunakan *Paired sampel T-test* diperoleh bahwa tidak ada perbedaan kinerja keuangan untuk periode satu tahun baik sebelum maupun setelah ditetapkan Kepmendagri No.29 tahun 2002, kecuali untuk rasio desentralisasi fiskal yang lebih baik setelah ditetapkan Kepmendagri No.29 tahun 2002.

Dari hasil pengujian bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah yang signifikan sebelum dan setelah ditetapkan Kepmendagri No.29 Tahun 2002 baik untuk periode dua tahun maupun satu tahun pengujian. Adapun analisis secara parsial untuk tiap tiap rasio keuangan sebagai berikut.

- 1) Nilai mean untuk periode pengujian dua tahun sebelum dan sesudah ditetapkan Kepmendagri No.29 tahun 2002 adalah 0,215 dan 0,2796, sedangkan periode pengujian satu tahun sebelum dan sesudah ditetapkan Kepmendagri No.29 tahun 2002 adalah 0,2289 dan 0,275. Hasil pengujian menunjukkan konsisten baik periode satu tahun dan dua tahun. Ini menunjukkan tidak berbeda secara signifikan kinerja keuangan dalam bentuk kemampuan pembiayaan daerah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh sebelum dan setelah ditetapkan Kepmendagri No.29 tahun 2002.
- 2) Nilai mean untuk periode pengujian dua tahun sebelum dan sesudah ditetapkan Kepmendagri No.29 tahun 2002 adalah 0,305 dan 0,227, sedangkan untuk periode pengujian satu tahun sebelum dan sesudah ditetapkan Kepmendagri No.29 tahun 2002 adalah 0,3341 dan 0,260. Ini menunjukkan tidak berbeda secara signifikan kinerja keuangan dalam bentuk kemampuan mobilisasi daerah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh sebelum dan setelah ditetapkan Kepmendagri No.29.
- 3) Nilai mean untuk periode pengujian dua tahun sebelum dan sesudah ditetapkan Kepmendagri No.29 tahun 2002 adalah 0,357 dan 0,307, sedangkan untuk periode pengujian satu tahun sebelum dan sesudah ditetapkan Kepmendagri No.29 tahun 2002 adalah 0,3317 dan 0,322. Ini menunjukkan adanya

perbedaan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan dalam bentuk tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sebelum dan setelah ditetapkannya Kepmendagri No.29 .

- 4) Nilai mean untuk periode pengujian dua tahun sebelum dan sesudah ditetapkannya Kepmendagri No.29 tahun 2002 adalah 0,020 dan 0,0327, sedangkan untuk periode pengujian satu tahun sebelum dan sesudah ditetapkannya Kepmendagri No.29 tahun 2002 sebesar 0,0164 dan 0,033. Tingkat desentralisasi fiskal setelah ditetapkannya Kepmendagri No.29 tahun 2002 mengalami kenaikan, ini menunjukkan kinerja keuangan dalam bentuk desentralisasi fiskal pemerintah kabupaten/kota sebelum dan setelah ditetapkannya Kepmendagri No.29 berbeda secara signifikan.

Pembuktian Hipotesis

Untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini, maka akan diuraikan satu persatu. Hipotesis yang telah penulis ajukan:

- H1 : Hasil penelitian untuk periode dua tahun pengujian diperoleh nilai $t_{hitung} = -1,169 < t_{tabel} = 0,225$ dan untuk periode satu tahun pengujian $t_{hitung} = -0,770 < t_{tabel} = 0,457$. Dengan tingkat signifikansi α (5%). Ini menunjukkan hipotesis H1 ditolak artinya tidak terdapat perbedaan nyata kinerja keuangan pemerintah daerah dalam bentuk kemampuan pembiayaan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya Kepmendagri No.29 tahun 2002.
- H2 : Hasil penelitian untuk periode dua tahun pengujian diperoleh $t_{hitung} = 1,144 > t_{tabel} = 0,265$ dan untuk periode satu tahun pengujian $t_{hitung} = 1,202 > t_{tabel} = 0,255$. Dengan tingkat signifikansi α (5%). Ini menunjukkan bahwa hipotesis H2 ditolak artinya tidak terdapat perbedaan nyata kinerja keuangan pemerintah daerah dalam bentuk kemampuan mobilisasi baik sebelum maupun setelah ditetapkannya Kepmendagri No.29 Tahun 2002.
- H3 : Hasil penelitian untuk periode dua tahun pengujian diperoleh nilai $t_{hitung} = 0,644 < t_{tabel} = 0,526$ dan untuk periode satu tahun pengujian $t_{hitung} = 0,125 < t_{tabel} = 0,903$. Dengan tingkat signifikansi α (5%). Ini menunjukkan bahwa hipotesis H3 ditolak artinya tidak terdapat perbedaan nyata kinerja keuangan pemerintah daerah dalam bentuk tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat baik sebelum maupun setelah ditetapkannya Kepmendagri No.29 Tahun 2002.
- H4 : Hasil penelitian untuk periode dua tahun pengujian diperoleh nilai $t_{hitung} = -2,847 < t_{tabel} = 0,009$ dan untuk periode pengujian satu tahun nilai $t_{hitung} = -3,377 < t_{tabel} = 0,006$. Dengan tingkat signifikansi α (5%). Ini menunjukkan bahwa hipotesis H4 diterima artinya terdapat perbedaan antara kinerja keuangan dalam bentuk

desentralisasi fiskal sebelum dan sesudah ditetapkannya Kepmendagri No.29 Tahun 2002.

Berdasarkan hasil penelitian dapat terlihat bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum ditetapkannya Kepmendagri No.29 Tahun 2002 tidak berbeda atau berubah setelah ditetapkannya Kepmendagri No.29 Tahun 2002, yang berarti bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah tidak lebih baik setelah ditetapkannya Kepmendagri No.29 Tahun 2002. Hal ini kemungkinan disebabkan masih belum optimalnya penerimaan daerah yang berasal dari APBD.

Hanya rasio desentralisasi fiskal saja yang mengalami kenaikan setelah ditetapkannya Kepmendagri No.29 Tahun 2002. Hal ini berarti tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan semakin tinggi setelah ditetapkannya Kepmendagri No.29 tahun 2002.

Sebelum ditetapkannya Kepmendagri No.29 tahun 2002 tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi. Setelah ditetapkannya Kepmendagri No.29 tahun 2002 tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat juga masih tinggi. Walaupun Kepmendagri No.29 tahun 2002 ini telah mengganti sistem keuangan daerah dari sistem anggaran berimbang menjadi sistem anggaran berbasis kinerja, namun kinerja keuangan daerah masih sama seperti sebelum ditetapkannya Kepmendagri No.29 tahun 2002 tersebut. Tidak ada perubahan kinerja keuangan daerah yang berarti setelah ditetapkannya Kepmendagri No.29 tahun 2002.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian disimpulkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan semakin tinggi setelah ditetapkannya Kepmendagri No.29 tahun 2002 namun kinerja keuangan pemerintah daerah Aceh tidak mengalami perubahan baik sebelum maupun sesudah ditetapkannya Kepmendagri No.29 tahun 2002. Hal ini disebabkan :

1. Pemerintah daerah Aceh belum mampu mengembangkan, mengusahakan sumber-sumber dan meningkatkan penerimaan APBD.
2. Masih tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.
3. Belum maksimalnya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

PUSTAKA ACUAN

- Arifin, Johan (2005) "Analisis kinerja keuangan sebelum dan pada saat Fiscal Stress (studi terhadap beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat)" *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*. Vol. 06. No.02:105-124.
- Bastian, Indra (2006) *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Jakarta, Erlangga.
- Bayani, Syahrul (2005) "Analisis Rasio Keuangan Pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Besar" Skripsi. Universitas Syiah Kuala.
- Fadilah, Nur dan Muhtar (2004) "Proses penyusunan anggaran dan pengalokasian belanja di pemda kabupaten Wonogiri" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Vol 19. No.1:27-56.
- Halim, Abdul (2002) *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah : Sri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN.
- (2004) *Akuntansi Sektor Publik – Akutansi Keuangan Daerah*, Jakarta, salemba Empat.
- Kuncoro, Mudrajad (2004) *Otonomi dan pembangunan daerah: Reformasi, Perencanaan , strategi dan Peluang*, Jakarta, Erlangga.
- Landiyanto , Erlangga Agustino (2005) *Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan kota di Era Otonomi Daerah : Studi kasus Kota Surabaya*, Surabaya, Universitas Erlangga Surabaya.
- Munir, H Dasril, HA Djuanda, dan HNS Tangkisilan (2004) *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, YPAPI.
- Mariana, Dede (2005) "Otonomi Daerah dan Reformasi APBD" *Harian pikiran Rakyat*. 14 Februari 2005.
- Mahsun, Muhammad, F Sulistiowati, dan HA Purwanugraha (2006) *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta, BPFE.
- PBB Overview (2004) "Pengantar Penyusunan Anggaran Kerja" 9 Agustus 2004 Republik Indonesia, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, Jakarta.
- Republik Indonesia, BPS (2003) *Stastiktik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota tahun 2000-2002*, Jakarta.
- Republik Indoonesia, BPS (2005) *Stastiktik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota tahun 2003-2004*, Jakarta
- Sucipto (2003) "Penilaian Kinerja Keuangan" Usu Digital Library. Universita Sumatra Utara.
- Sulistiowati, Firman (2005) "Pengaruh Penghasilan Terhadap Efektifitas Kinerja Kepala Perangkat Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2003)" *Jurnal Akutansi dan Keuangan sektor Publik*. Vol. 06. No. 02:27-54
- Susanti, Rini Maya (2006) " Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerh: Studi pada Daerah Kota Banda Aceh". Skripsi Universitas Syiah Kuala.

- Tangkilisan, Hessel Nogi s (2005) *Manajemen Publik*, Jakarta, Grassindo
- Trihendradi, Cornelius (2005) *Step By Step SPSS.13 : Analisis Data Statistik*, Yogyakarta, andi.